KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Uji Kelayakan Calon Panglima TNI: Komisi I DPR dalami Pemilu 2024 hingga LCS
Tanggal : Kamis, 01 Desember 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

UJI KELAYAKAN CALON PANGLIMA TNI

Komisi I DPR Dalami Pemilu 2024 hingga LCS

JAKARTA - Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI dalam waktu dekat.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Rizki Sadig akan menanyakan soal masa jabatannya yanghanyasetahunsebagaimana Jenderal Andika Perkasa, sementara 2023awal sudah memasuki tahapan Pemilu 2024. Kemudian bagaimana konsolidasi prajurit dan juga apa yang akan dipersiapkan dalam rangka itu. "Meskipun pada saat beliau pensiun lalu Presiden tidak melakukan perpanjangan, kemudian tidak melakukan proses pergantian lagi, ya itu tidak menjadi kendala berarti dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Saya kira itu yang menarik yang akan saya diskusikan," katanya kemarin.

Selain itu, soal tantangan regional maupun tantangan internasional. Calon panglima TNI ini berasal dari matra laut dan luasnya perairan Indonesia akan dibahas juga mengenai tantangan keamanan perairan di kawasan regional dan internasional seperti Laut China Selatan (LCS). "Dia punya *track record* yang baik untuk problem di Laut China Selatan yang bisa diredam dengan baik, negosiasi yang baik, itu yang menjadi landasan untuk menjaga perairan Indonesia dalam segala halyangmerugikan," paparnya.

Politikus PAN ini menuturkan, teman-teman di Komisi I DPR menilai penunjukan Yudo Margono merupakan pilihan yang tepat di waktu yang tepat. Alasannya, Komisi I juga sudah kerap mendiskusikan bahwa walaupun itu tidak menjadi ketentuan, tapi pergantian antarmatra untuk Panglima TNI menjadi sebuah saran. "Usulan Presiden untuk memilih Pak Yudo sebagai calon panglima yang akan datang dapat melakukan proses lanjutan di DPR, saya kira ini sesuatu yang menarik. Ini perlu diapresiasi dan sudah tepat karena rekam jejak beliau juga cukup baik," ungkapnya.

Adapun kecukupan waktu untuk melakukanujikelayakan, Rizki menjelaskan, itu karena masalah mekanisme dan prosedur. Surat presiden pun baru tiba pekan ini sehingga tidak perlu diburu-buru. Tinggal menunggu digelar rapat pimpinan (rapim), rapat Badan Musyawarah (Bamus), kemudian penugasan di Komisi I DPR sehingga maksimal keputusan dilakukan pekan depan.

"Saya kira maksimal minggu iniatau minggu depan, kitabaru berakhir pada 15 Desember dan waktunya pensiun Pak Andika masih sampai akhir Desember. *Fit and proper test* kan tidak lebih dari tiga hari," ucapnya.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Yudo Margono. Sebab, Komisi I belum memiliki aturan dasar untuk melakukan *fit and proper test*. "Prosedurnya ketika surat dikirimkan ke DPR dalam ranah pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR akan rapat pimpinan (rapim), Bamus, dan mereka akan dikirimkan kepada komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR," kata Meutya, Selasa (29/11).

Kendati demikian, dia berjanji akan segera melakukan uji jika hasil Bamus telah diserahkan ke Komisi I. Dengan begitu, *fit and proper test* dapat dilakukan sebelum DPR memasuki masa reses, 15 Desember 2022. "Karena itu, kami harus menunggu Bamus, setelah Bamus menugaskan Komisi I insyaallah Komisi I langsung siap mengadakan *fit and proper test* calon panglima TNI," sambung Meutya. ☐ ***kiswondari***